

## SEJARAH

# Hak Difabel Belum Terpenuhi

**JOGJA**--Hak-hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi dengan baik. Mereka belum bisa mengakses layanan medis/kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, hukum,abilitasi dan rehabilitasi, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, serta perolehan jaminan sosial terkait disabilitas. Terlebih lagi dalam bidang kebijakan. Kebijakan pemerintah yang saat ini ada belum sepenuhnya mendukung penguatan pemenuhan hak-hak asasi bagi penyandang disabilitas.

"Akibatnya, penyandang disabilitas ini masih dilihat sebagai masalah, bahkan ada juga yang memandangnya lebih dari sekedar masalah," ujar Koordinator ILAI, Winarta dalam seminar Hasil Kajian Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten di Provinsi DIY di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Menurut Winarta, masih banyak permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas pada sembilan bidang tersebut. Pada bidang aksesibilitas, jalan, bangunan dan transportasi misalnya, masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan belum meratanya akses informasi untuk penyandang disabilitas.

Selain itu pada bidang medis, belum semua penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Mereka belum semua layanan kesehatan yang dibutuhkan mereka tersedia, seperti fisioterapi, obat untuk penyandang gangguan jiwa, dan



YVESTA PUTU AYU/HARIAN BERNAS

**PAPARAN**--Para peserta mengikuti seminar 'Hasil Kajian Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Tingkat Kabupaten di Provinsi DIY' di UMY, kemarin.

home care.

"Masih adanya diskriminasi dalam ketentuan kepesertaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa," paparnya.

Pengakuan atas persamaan di muka hukum, para penyandang disabilitas tersebut lanjut Winarta juga masih mengalami kesenjangan dibandingkan dengan orang pada umumnya. Pada permasalahan hukum ini, banyak kasus yang menimpa penyandang disabilitas tapi mereka tidak bisa bersaksi di muka hukum. Padahal saat itu posisi mereka sebagai korban.

"Misalkan mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka tidak bisa bersaksi di muka umum. Selain itu, masih ada masalah lain yang mereka hadapi karena kesulitan berinteraksi dengan dunia luar, bahkan ada

pula dari mereka yang masih dipasung," ujarnya.

Sementara Koordinator FPHPD, Dr Arni Surwanti MSI mengatakan,, situasi yang dihadapi penyandang disabilitas memang masih memprihatinkan. Di DIY saja ada lebih dari 40 persen penyandang disabilitas yang belum dapat menikmati pendidikan, dan baru sekitar 20 persen dari mereka yang bekerja. Situasi ini ternyata menurutnya tidak lepas dari pandangan kuat di masa lalu bahwa penyandang disabilitas adalah persoalan medis semata (orang sakit) dan pendekatan yang diperlukan adalah belas kasihan.

"Program pemerintah cenderung hanya berupa kegiatan pemberian bantuan-bantuan kebutuhan hidup. Sementara kegiatan untuk memberdayakan

mereka sangat minim dan terbatas pilihannya. Penyandang disabilitas juga sulit mengakses hak yang sama dengan warga negara lainnya dan terpinggirkan perannya di masyarakat karena kurangnya dukungan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Karena itulah, keduanya berharap ke depannya para penyandang disabilitas ini bisa bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Namun untuk mewujudkan hal tersebut juga perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang segala kebijakannya harus berpihak pada mereka.

"Diharapkan bisa memberikan kesejahteraan pada para penyandang disabilitas," imbuhnya. (ptu)